

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu akan menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan yaitu :

Ulfan Dadan Raya (2019) dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Pekanbaru". Dalam penelitian ini mempunyai permasalahan bantuan yang diberikan belum tepat sasaran penerima program, fokus penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara . Teori efektivitas Makmur digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu dengan ukuran efektivitas ketetapan dalam penentuan waktu, ketetapan perhitungan biaya, ketetapan dalam pengukuran, ketetapan dalam menentukan pilihan, ketetapan berfikir, ketetapan dalam melakukan perintah, ketetapan dalam menentukan tujuan, ketetapan sasaran. Dalam penelitian ini pelaksanaan program BSPS di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan efektif hal ini ditandai dengan tidak tepatnya pengukuran waktu, penghitungan biaya, dan ketetapan sasaran.

Ikeu Kania (2021) dengan judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Garut". Penelitian akan berfokus pada implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut dengan menggunakan pendekatan teori *Metter* dan *Horn* yang terdiri dari standard an tujuan, sumber daya, hubungan antar organisasi, fitur organisasi, situasi social ekonomi dan politik, dan sikap pemangku kepentingan pelaksana, selain itu penelitian akan menjelaskan hambatan dan upaya dalam implementasi program BSPS di desa Cisaat Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan evaluatif. Pada penelitian ini memperoleh hasil pada pelaksanaan program belum berjalan secara optimal, terdapat masalah miss komunikasi yang menjadi kendalanya, tingkat kesadaran akan pentingnya menyimpan berkas arsip yang rendah, dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Halimah, Bambang Irawan, Cathas Teguh Prakoso (2019) dengan judul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat pada keterbatasan anggaran dalam merenovasi sehingga masih terdapat rumah yang mendapatkan bantuan dan sudah di renovasi belum selesai secara sempurna. Penelitian berfokus pada implementasi program Bantuan Sitimulan Perumahan Swadaya dengan unit analisis penetapan penerima BSPS, penyaluran bahan BSPS, pembinaan pelaksanaan BSPS, pemantauan dan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung

implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini memperoleh hasil implementasi program BPSPS berpengaruh positif akan tetapi belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari keterbatasan anggaran yang membuat beberapa rumah yang menerima bantuan masih belum dapat secara utuh menutupi semua kerusakan rumah sehingga diharapkan dapat memberikan penambahan anggaran terhadap pelaksanaan program BPSPS.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemahaman masyarakat terhadap bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah masih kurang dan masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga menghambat pelaksanaan program BPSPS. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan pelaksanaan program BPSPS tidak berjalan dengan efektif hal ini ditandai dengan tidak tepatnya pengukuran waktu, perhitungan biaya, ketetapan sasaran, terdapat masalah *miss* komunikasi, tingkat kesadaran akan pentingnya menyimpan arsip yang rendah, kurang sarana dan prasarana sehingga dalam penelitian yang dilaksanakan akan berfokus pada efektifitas pelaksanaan program BPSPS menggunakan indikator unit analisis dengan mengukur tingkat efektivitas melalui ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

## 2.2. Konsep Efektifitas

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat pencapaian dari hasil yang didapat, efektifitas mengukur berapa jauh hasil yang didapat dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam bahasa Inggris kata *effective* berarti berhasil ataupun sesuatu pelaksanaan yang berhasil. *Emerson* menyatakan efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>1</sup>

Efektifitas adalah istilah dalam manajemen operasi/operation research, maksudnya adalah kemampuan mencapai target atau tujuan.<sup>2</sup> Efektivitas adalah ukuran terhadap hasil pencapaian suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya, apabila tujuan tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan maka usaha atau program tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Selanjutnya menurut *sedarmayanti*, efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian ini lebih berfokus kepada keluaran hasil yang diperoleh dibanding masukan sehingga keluaran hasil program menjadi sorotan utama.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditarik sebuah kesimpulan yaitu efektifitas adalah suatu tingkatan capaian hasil dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang apabila tujuan tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan dapat diartikan program yang telah dilaksanakan berjalan dengan

---

<sup>1</sup> Lubis. Loc. Cit. 7.

<sup>2</sup> Mu'minin, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsp) Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember' (Universitas Jember, 2018). 36-37.

<sup>3</sup> Khaliza, 'Efektivitas Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Sejahtera Kota Tanjungbalai' (Universitas Sumatera Utara, 2020). 13.

efektif. Namun jika terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan yang diinginkan maka program tersebut tidak dapat dikatakan efektif.

Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas dalam sebuah program dibutuhkan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program. Adapun ukuran efektifitas menurut Makmur menggunakan beberapa kriteria yaitu :<sup>4</sup>

1. Ketetapan dalam penentuan waktu
2. Ketetapan penghitungan biaya
3. Ketetapan dalam pengukuran
4. Ketetapan dalam menentukan pilihan
5. Ketetapan berpikir
6. Ketetapan dalam melakukan perintah
7. Ketetapan dalam menentukan tujuan
8. Ketetapan sasaran

*Campbell J.P.* mengemukakan bahwa untuk mengukur hasil dari efektifitas Program dapat dilihat melalui beberapa kriteria yaitu:<sup>5</sup>

1. Keberhasilan Program

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari bagaimana kemampuan untuk melaksanakan program yang didukung oleh dukungan operasional, dari mekanisme dan proses dalam pelaksanaan program yang

---

<sup>4</sup> Raya. Op. Cit. 3.

<sup>5</sup> Lubis. Op. Cit. 9-10.

berjalan dapat menentukan bagaimana tingkat keberhasilan program nantinya.

## 2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran suatu program dapat menjadi salah satu kriteria dalam mengukur tingkat efektivitas suatu program, keberhasilan sasaran masuk dalam aspek *output* (keluaran) dari suatu program. Efektivitas akan mengukur seberapa jauh target sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 3. Kepuasan Terhadap Program

Kriteria selanjutnya yaitu kepuasan terhadap program dapat menjadi acuan mengukur tingkat efektivitas program dimana kepuasan akan mengarah pada keberhasilan suatu program yang dapat memenuhi harapan pengguna sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan pengguna. Semakin berkualitas hasil dari pelaksanaan program akan meningkatkan kepuasan pengguna atau penerima program.

## 4. Tingkat *Input* dan *Output*

Pengukuran efektifitas program melalui tingkat *Input* dan *output* ditinjau melalui perbandingan antara tingkat besaran *output* (keluaran) dari pada *input* (masukan) dimana apabila *output* lebih besar dari pada *input* maka program tersebut dapat dikatakan efektif dan apabila *input* lebih besar dari pada *output* maka program tersebut tidak dapat dikatakan efektif.

## 5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Kriteria terkait pencapaian tujuan menyeluruh mengukur sejauh mana organisasi atau perusahaan melaksanakan tugas-tugas yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Hal ini ditinjau dari setelah program dirancang dan tujuan telah dicapai pada saat pelaksanaan program maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Lubis dan Martani, terdapat tiga pendekatan dalam mendeskripsikan efektifitas suatu organisasi yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber berfokus pada input (masukan), efektifitas akan diukur melalui pendekatan yang melihat tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang menjadi kebutuhan organisasi.

### 2. Pendekatan Proses

Merupakan ukuran efektifitas melalui pendekatan proses dan mekanisme suatu organisasi dalam melaksanakan program.

### 3. Pendekatan Sasaran

Tingkat efektivitas akan diukur melalui pendekatan yang memfokuskan pada hasil keluaran dari pelaksanaan program dengan

---

<sup>6</sup> Ibid.10-11.

mengukur sejauh mana sasaran program sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ni Wayan Budiani sebagaimana dikutip oleh Pratiwi menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:<sup>7</sup>

#### 1. Ketepatan Sasaran Program

Dalam pelaksanaan program, ketepatan sasaran akan ditinjau melalui kesesuaian sasaran penerima program terhadap tingkat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat kesesuaian sasaran mempengaruhi keberhasilan program yang dilaksanakan sehingga apabila sasaran yang dipilih kurang memenuhi kriteria dan tidak tepat maka akan mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan program.

#### 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi penting untuk dilakukan agar dapat memberikan gambaran ataupun pemahaman umum terkait program yang akan dilaksanakan, kemampuan menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat atau sasaran program akan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan program. Dengan semakin banyaknya informasi yang dapat

---

<sup>7</sup> Pratiwi, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021). 17-19.

disaring oleh masyarakat akan memberikan pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan nantinya.

### 3. Tujuan Program

Aspek tujuan program akan mengarah pada tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan program terhadap hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap tahap dalam pelaksanaan program berpengaruh pada hasil dari tujuan program nantinya, batas waktu serta sasaran program menjadi salah satu faktor yang menjadi pengaruh dari hasil pelaksanaan nantinya yang akan menentukan sesuai tidaknya tujuan program yang telah dicapai.

### 4. Pemantauan Program

Pemantauan program dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilaksanakan untuk mengecek ataupun pemeriksaan untuk mengamati sejauh mana proses suatu kegiatan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal sehingga apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka dibutuhkan perbaikan agar dapat menghindari hasil yang tidak diinginkan.

Selanjutnya menurut Dwijowijoto sebagaimana dikutip oleh Mu'minin, implementasi kebijakan ada tiga tingkatan efektifitas implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mu'minin. Op. Cit. 38-39.

1. Efektif

Jika semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik.

2. Cukup Efektif

Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang tidak terpenuhi.

3. Tidak Efektif

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengukuran efektifitas diatas, peneliti akan menggunakan teori Budiani untuk mengukur efektivitas program BSPS dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketetapan sasaran program

Ditinjau melalui kesesuaian sasaran penerima program terhadap tingkat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Kemampuan menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat dan penerima program sehingga dapat memberikan pemahaman terkait program yang akan dilaksanakan.

### 3. Tujuan program

Sejauh mana tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan program terhadap hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

### 4. Pemantauan program

Pengawasan yang dilaksanakan untuk mengecek dan mengamati sejauh mana proses kegiatan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan.

## **2.3. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan menjadi suatu tindak lanjutan dari sebuah rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk menentukan setiap proses yang akan berjalan. Menurut *Royse, Thyer* dan *Padgett* mengemukakan bahwa program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan dengan maksud untuk menjangkau sasaran-sasaran tertentu.<sup>9</sup> Program adalah suatu kumpulan dari proyek yang berhubungan serta telah dirancang sedemikian rupa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan agar sasaran dari kebijaksanaan yang sudah dirancang sebelumnya dapat dicapai secara keseluruhan.

Pelaksanaan program merupakan suatu tindak lanjut dalam menerapkan suatu program yang telah ditentukan sebelumnya dimana terdiri dari berbagai proses dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan.

---

<sup>9</sup> Pratiwi. Op. Cit. 25-26.

Program pemerintah merupakan suatu proses dan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kebijakan yang telah dirancang dan ditetapkan sebelumnya. Program yang dibuat oleh pemerintah harus direncanakan dan dirancang secara menyeluruh sehingga pada pelaksanaannya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

#### **2.4. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

##### **2.4.1. Pengertian BSPS**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu kriteria calon penerima bantuan BSPS, dimana masyarakat tersebut mempunyai penghasilan yang tidak mencukupi sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Program BSPS mempunyai beberapa jenis kegiatan seperti peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) yang merupakan suatu kegiatan memperbaiki rumah yang tidak layak untuk dihuni sehingga dapat menjadi rumah layak huni. Kemudian terdapat kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) adalah jenis kegiatan membangun rumah baru yang layak untuk dihuni.

#### 2.4.2. Dasar Hukum Program BPS

Pelaksanaan program BPS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-Undang ini merupakan bentuk pertimbangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20, 21, 28C ayat (1), 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), 33 ayat (3), serta pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu, Pemerintah dan Pemerintah daerah juga wajib untuk memberikan kemudahan untuk memperoleh rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan, kemudahan ataupun bantuan yang diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat berupa subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, ataupun prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pada pelaksanaan program BPS mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan bentuk revisi terbaru dari peraturan sebelumnya tentang bantuan stimulan perumahan swadaya.

#### 2.4.3. Penerima Program BPS

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya,<sup>10</sup> pada bab IV Penerima BSPS pasal 11 ayat (1) menyebutkan untuk penerima BSPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan seperti warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, belum memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan, berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi, dan bersedia berswadaya dan membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng. Adapun untuk permasalahan tanah harus memenuhi persyaratan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah.

Kriteria rumah tidak layak huni :<sup>11</sup>

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
2. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
3. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
4. Rusak berat, dan/atau
5. Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m<sup>2</sup>

<sup>10</sup> 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya'.

<sup>11</sup> 'a36ba\_\_Bahan\_Paparan\_\_Modul\_7\_-\_Penyelenggaraan\_Bantuan\_Stimulan\_Pe...' <<https://www.slideshare.net/SiechaLathifahFork/a36babahanpaparanmodul7penyelenggaraanbantuanstimulanperumahanswadayaaptx>> [diakses 27 November 2022].

## 2.5. Kerangka Pikir

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan program BPS melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penelitian ini dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program BPS peneliti akan menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program, kesesuaian sasaran penerima program terhadap tingkat sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, kemampuan menyampaikan informasi yang baik kepada penerima program sehingga memberikan pemahaman terhadap program yang akan dilaksanakan.
3. Tujuan Program, sejauh mana kesesuaian hasil pelaksanaan program terhadap hasil yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pemantauan Program, pengawasan yang dilaksanakan untuk mengecek dan mengamati proses dan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan.

Berdasarkan uraian kerangka diatas, berikut peneliti akan menggambarkan kerangka pikir melalui gambar berikut ini:

**Bagan 2.1. Kerangka Pikir**